

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kabupaten Pekalongan

Kabupaten pekalongan merupakan salah satu kabupaten dari 35 kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pekalongan terletak di jalur pantai utara (pantura) Laut Jawa yang memanjang ke arah selatan dengan Kota Kajen sebagai Ibu Kota pusat pemerintahan. Luas wilayah Kabupaten Pekalongan 3.836,15 Km² yang secara geografis terletak diantara 6° - 7° 23' Lintang Selatan dan antara 109° - 109° 78' Bujur Timur dan berbatasan dengan:

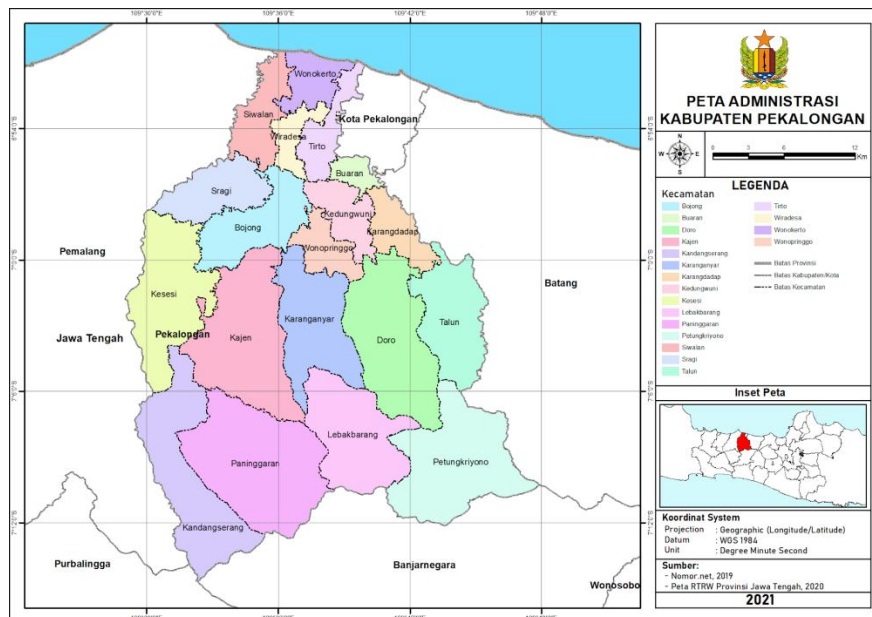
SebelahTimur : Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang

Sebelah Utara : Laut Jawa, Kota Pekalongan

Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara

Sebelah Barat : Kabupaten Pemalang

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Pekalongan



Sumber : pekalongankab.go.id

Apabila dilihat pada Gambar 2.1 kondisi topografis wilayah Kabupaten Pekalongan memiliki wilayah perpaduan antara wilayah dataran rendah di bagian utara dan wilayah dataran tinggi/pegunungan di bagian selatan termasuk diantaranya Kecamatan Petungkriyono, Lebakbarang, Paninggaran, Kandangserang, Talun, Doro, dan sebagian di wilayah Kecamatan Karanganyar serta Kajen dengan titik tertingginya mencapai 1.294 meter diatas permukaan laut yang terletak di Kecamatan Petungkriyono. Bagian selatan sebagaimana layaknya daerah pegunungan memiliki kondisi tanah yang subur sehingga menjadi sentra hasil pertanian seperti sayur mayur, buah - buahan hingga produk olahan lainnya. Sedangkan wilayah bagian utara yang merupakan wilayah dataran rendah dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi menjadi pusat perdagangan dan beberapa sentra industri seperti industri tekstil, industri batik dan lainnya.

Kabupaten Pekalongan memiliki jumlah penduduk sebesar 968.821 jiwa pada tahun 2020 yang tersebar di 19 kecamatan. Jumlah ini terjadi peningkatan dari tahun 2019 yang berjumlah 897.711 jiwa atau sekitar 1,53 %. Jumlah penduduk terbesar berada di wilayah Kecamatan Kedungwuni dengan jumlah sebesar 100.796 jiwa, sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk terkecil berada di wilayah Kecamatan Lebakbarang dengan jumlah sebesar 11.116 jiwa (BPS, 2020). Jika dicermati daerah yang berada di wilayah bagian selatan seperti Kecamatan Lebakbarang dengan kondisi geografis yang didominasi wilayah pegunungan, memiliki jumlah penduduk yang cenderung rendah sedangkan wilayah bagian utara seperti Kecamatan Kedungwuni memiliki jumlah penduduk yang tinggi.

Apabila dilihat dari kepadatan penduduk, Kecamatan Lebakbarang (191 jiwa/km²) juga menjadi salah satu kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah selain Kecamatan Petungkriyono (179 jiwa/km²) dengan tingkat kepadatan penduduk dibawah 200 jiwa/km². Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi atau diatas 4000 jiwa/km² berada di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Kedungwuni (4,396 jiwa/km²), Buaran (4,929 jiwa/km²), Wiradesa (4,893 jiwa/km²), dan Tirto (4,295 jiwa/km²).

Tabel 2. 1 Penduduk Kab.Pekalongan menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jumlah	Kategori
0 – 14	234.176 jiwa	Usia Tidak Produktif Muda
15 – 64	676.432 jiwa	Usia Produktif
65 ke atas	58.210 jiwa	Usia Tidak Produktif Tua

Sumber : *Kabupaten Pekalongan dalam Angka 2021*

Pada Tabel 2.1 dapat dilihat komposisi penduduk Kabupaten Pekalongan menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk Kabupaten Pekalongan masuk dalam usia produktif yaitu sebesar 676.432 jiwa. Sedangkan penduduk usia tidak produktif muda sebanyak 234.176 jiwa dan penduduk usia tidak produktif tua sebanyak 58.210 jiwa. Berdasarkan kelompok umur tersebut juga dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Pekalongan telah masuk dalam usia kerja yaitu penduduk yang berusia 15 tahun lebih. Data dari BPS sendiri menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang telah memasuki usia kerja pada tahun 2020 adalah 674.437 jiwa. Namun sebagian besar penduduk Kabupaten Pekalongan yang telah memasuki usia kerja memiliki tingkat pendidikan hanya sampai Sekolah Dasar.

Tabel 2. 2 Penduduk Kab. Pekalongan menurut Pendidikan yang ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Jumlah bukan angkatan kerja	Jumlah penduduk usia kerja	Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja
< Sekolah Dasar	96.295	345.478	72.13
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	60.540	161.928	62.61
Sekolah Menengah Atas (SMA)	34.038	129.132	73.64
Perguruan Tinggi (PT)	3.133	37.899	91.73
Jumlah	195.006	674.437	71.23

Sumber : *Buku Profil Kudu Sekolah 2021*

Pada Tabel 2.2 dapat dilihat tentang komposisi penduduk Kabupaten Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk usia kerja yang sebagian besar masih sampai pada tingkat Sekolah Dasar (SD) tentu tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan wajib belajar 9 tahun dan rintisan 12 tahun. Terlebih menurut pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan bahwa rata – rata lama sekolah di Kabupaten Pekalongan masih berada jauh di bawah standar provinsi Jawa Tengah yakni hanya 6 tahun 8 bulan. Pendidikan menjadi salah satu komponen yang penting dalam IPM. Tingkat pendidikan ini akan berpengaruh terhadap angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah. Pada tahun 2018 Kabupaten Pekalongan menempati urutan 11 terendah IPM di Provinsi Jawa Tengah dengan indeks pendidikannya 0,56 yang merupakan komponen paling lemah dari 3 komponen lainnya. Sedangkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Tingkat Pendidikan Penduduk Kab. Pekalongan

Karakteristik	Tidak/Belum pernah bersekolah	Masih bersekolah			Tidak bersekolah lagi
		SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	
Jenis Kelamin					
Laki – laki	3,38	14,48	5,01	5,21	71,92
Perempuan	6,87	12,45	5,40	5,09	70,19
Kelompok Pengeluaran					
40 persen terbawah	7,34	15,60	5,42	3,65	67,99
40 persen tengah	3,61	12,67	4,86	5,38	73,48

40 persen teratas	3,98	10,91	5,50	7,55	72,06
Kab. Pkl	5,14	13,45	5,21	5,15	71,05

Sumber : *Buku Profil Kudu Sekolah 2021*

Data pada Tabel 2.3 menunjukkan bahwa terdapat sebesar 71,05% penduduk berumur 5 tahun keatas yang masuk dalam usia sekolah yang tidak bersekolah lagi. Sedangkan penduduk yang belum atau tidak pernah sekolah usia 5 tahun keatas berjumlah 5,14 %. Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pekalongan dikategorikan ke dalam tiga kategori yaitu (Litbang, 2020) :

1. Kategori *Drop Out*

Merupakan anak yang pernah mengenyam pendidikan atau proses belajar di satu jenjang pendidikan tertentu, namun kemudian tidak putus dan tidak melanjutkan disebabkan alasan tertentu.

2. Kategori Tidak Melanjutkan

Yaitu anak yang pernah bersekolah dan menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu namun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

3. Belum/Tidak Pernah Sekolah

Yaitu anak yang belum pernah bersekolah sama sekali baik di jenjang pendidikan formal maupun non formal.

Jumlah diatas menunjukkan bahwa sektor pendidikan sebagai salah satu komponen penting dalam pembangunan sumber daya manusia masih harus

mendapat perhatian, dikarenakan sebagian besar penduduk yang masuk dalam usia sekolah tidak lagi bersekolah.

Tabel 2. 4 Data Sekolah di Kabupaten Pekalongan

Jenjang Pendidikan	Sekolah		
	Negeri	Swasta	Jumlah
SD	478	35	513
MI	-	120	120
Jumlah SD	478	155	633
SMP	63	20	83
MTs	-	35	35
Jumlah SMP/MTs	63	55	118
SMA	11	7	18
SMK	4	29	33
MA	-	15	15
Jumlah SMA/SMK/MA	15	51	66

Sumber : *Kabupaten Pekalongan dalam Angka 2021*

Data pada Tabel 2.4 menunjukkan bahwa apabila dilihat dari segi fasilitas pendidikan, Kabupaten Pekalongan sendiri memiliki fasilitas pendidikan berupa sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga tingkat Sekolah Menengah Atas yang cukup memadai. Fasilitas tersebut tersebar di 19 Kecamatan yang berada di Kabupaten Pekalongan. Adanya fasilitas pendidikan di setiap jenjang pendidikan di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Pekalongan seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengakses pendidikan. Walaupun harus

diakui, di beberapa kecamatan lokasi sekolah terkendala dengan kondisi geografis seperti di wilayah pegunungan.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan sendiri menyadari hal ini. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pekalongan merumuskan sebuah program yang berupaya untuk memperbaiki tingkat pendidikan penduduknya, salah satunya program Kudu sekolah. Gerakan ini mengusung konsep kolaboratif dengan melibatkan aktor – aktor penting yang terkait. Konsep kolaboratif ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya target dari gerakan Kudu Sekolah dan berkontribusi terhadap perbaikan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Pekalongan.

2.2 Kecamatan Kesesi

Kecamatan Kesesi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pekalongan yang terletak di wilayah bagian barat Kabupaten Pekalongan yang berbatasan dengan Kabupaten Pemalang.

Gambar 2. 2 Peta Kecamatan Kesesi



Sumber : *pekalongankab.go.id*

Kecamatan Kesesi memiliki wilayah yang termasuk dalam kategori Dataran Rendah dengan ketinggian rata – rata permukaan tanah adalah 40 meter diatas permukaan laut sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.2. Kondisi wilayah yang didominasi oleh dataran rendah ini, menjadikan Kesesi sebagai salah satu wilayah yang menjadi sentra pengembangan pertanian tanaman pangan padi, hal ini berdasarkan pada kriteria presentase lahan basah (sawah) yang cukup besar (>25%) dan tingkat produktivitas tanaman padi yang cukup tinggi (Kabupaten Pekalongan, 2017)

Kecamatan Kesesi memiliki penduduk berjumlah 61.980 jiwa penduduk yang tersebar di 23 desa dengan angka sex ratio mencapai kurang lebih 95 %, yang artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 95 penduduk laki – laki. Di tingkat Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kesesi termasuk dalam 5 kecamatan dengan jumlah penduduk yang tinggi setelah Kecamatan Kedungwuni, Tirta, Bojong, dan Sragi (BPS, 2020).

Jumlah penduduk yang cukup besar akan berdampak terhadap beberapa bidang salah satunya adalah permasalahan kualitas sumber daya manusia. Maka untuk memastikan terciptanya sumber daya manusia yang terjamin harus didukung dengan fasilitas pendidikan yang memadai yang dapat dijangkau oleh semua penduduk dalam wilayah tersebut. Berikut data fasilitas pendidikan yang berada di wilayah Kecamatan Kesesi.

Tabel 2. 5 Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Kesesi

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1	TK	31
2	SD (Negeri & Swasta)	42
3	SMP/Mts (Negeri & Swasta)	8
4	SMA/MA (Negeri & Swasta)	6

Sumber : *Kecamatan Kesesi dalam Angka 2020*

Tabel 2.5 menunjukkan fasilitas pendidikan yang berada di wilayah Kecamatan Kesesi. Pada tingkatan pendidikan pra sekolah dasar seperti Taman Kanak – Kanak (TK) terdapat hampir di semua desa. Hanya 1 desa yang tidak memiliki fasilitas pendidikan TK yaitu Desa Srinahan. Akan tetapi, keterbatasan ini didukung dengan keberadaan TK di desa yang berdekatan yang dengan Desa Srinahan yaitu Desa Kesesi, dimana di Desa Kesesi terdapat 3 Taman Kanak – Kanak sehingga dapat menutupi kekurangan yang berada di Desa Srinahan, mengingat letak kedua Desa tersebut yang berbatasan secara langsung.

Pada tingkatan Sekolah Dasar (SD) yang berjumlah 42 Sekolah tersebar merata di 23 Desa. Masing – Masing desa memiliki satu atau dua fasilitas SD, hanya satu desa yang memiliki fasilitas SD berjumlah lima sekolah yaitu desa Kesesi.

Kemudian untuk tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau pun Madrasah Tsanawiyah (MTs) terdapat 8 fasilitas pendidikan dengan rincian 4 SMP Negeri, 2 SMP Swasta, 1 MTs Negeri, dan 1 MTs Swasta. Fasilitas pendidikan ini tersebar di Kecamatan Kesesi yang bisa dikelompokkan sesuai

dengan wilayah, untuk desa di wilayah utara terdapat SMP Negeri 3 Kesesi, kemudian untuk desa di wilayah Barat terdapat SMP Negeri 1 Kesesi, MTs Negeri Kesesi, MTs Rifaiyah, dan SMP Muhammadiyah Kesesi, sedangkan untuk desa di wilayah Selatan dan Timur terdapat SMP Negeri 2 Kesesi, SMP Satu Atap dan SMP NU Kesesi. Persebaran fasilitas tersebut dapat dikatakan cukup merata, dimana fasilitas tersebut dapat mencakup seluruh desa yang berada di wilayah Kecamatan Kesesi tanpa harus terkendala dengan jarak. Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut sesuai dengan domisilinya masing – masing.

Selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Kecamatan Kesesi memiliki 6 sekolah. Lima sekolah berstatus sekolah swasta, hanya satu sekolah yang berstatus negeri. Apabila dilihat dari letaknya, sebagian besar sekolah tersebut terletak di kota kecamatan yaitu di desa kesesi dan desa kaibahan diantaranya seperti SMA Negeri 1 Kesesi, SMK NU Kesesi, SMK Muhammadiyah Kesesi, dan MA Yappi. Kedua desa tersebut dapat dikatakan sebagai pusat kecamatan karena terdapat pusat pemerintahan kantor kecamatan. Sedangkan, dua sekolah lainnya yaitu SMK Rifaiyah terletak di Desa Srinahan dan SMK Prima terletak di Desa Mulyorejo.

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Kesesi dapat dikatakan mencukupi karena sudah terdapat fasilitas pendidikan di masing – masing jenjang pendidikan. Namun kondisi ini berbanding terbalik apabila dilihat dari tingginya jumlah ATS yang berada di Kecamatan Kesesi.

Tabel 2. 6 Jumlah ATS terbanyak Kab. Pekalongan

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Kandangserang	557
2	Bojong	404
3	Kajen	368
4	Kesesi	295
5	Paninggaran	269

Sumber : *Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, 2021*

Pada Tabel 2.6 menunjukkan 5 Kecamatan dengan jumlah ATS terbanyak. Kecamatan Kesesi termasuk dalam 5 teratas kecamatan dengan jumlah ATS terbanyak dengan jumlah 295 ATS dan menduduki posisi 4 terbanyak. Jumlah tersebut tersebar di 23 Desa di Kecamatan Kesesi, dengan jumlah tertinggi berada di Desa Kesesi dan Desa Windurojo. Jumlah ATS tersebut dikelompokkan dalam 3 kategori ATS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Gerakan Kudu Sekolah.

:

Tabel 2. 7 ATS berdasarkan Kategori di Kecamatan Kesesi

NO	DESA	KATEGORI			JUMLAH
		DO	Tidak Melanjutkan	Belum / Tidak Pernah Sekolah	
1	BRONDONG	3	5		8
2	JAGUNG	2	9		11
3	KAIBAHAN	3			3
4	KALIMADE	3	7		10
5	KARANGREJO	1	2		3
6	KARYOMUKTI	6	7	2	15
7	KESESI	23	9	4	36
8	KRANDON	5	4		9
9	KWASEN	5	5	3	13
10	KWIGARAN	6	9	2	17
11	LANGENSARI	6	6		12
12	MULYOREJO	10	8		18
13	PANTIREJO	6	3		9
14	PODOSARI	2	7		9
15	PONOLAWEN	7	15	1	23
16	SIDOMULYO	4	3		7
17	SIDOSARI	3	6	1	10
18	SRINAHAN	3	3		6
19	SUKOREJO	5	5		10
20	UJUNG NEGORO	6	4	1	11
21	WATUGAJAH	7	2		9
22	WATUPAYUNG	9	1		10
23	WINDUROJO	16	20		36
	JUMLAH	141	140	14	295

Sumber : *Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, 2021*

Tabel 2.7 diatas menunjukkan jumlah ATS yang berada di Kecamatan Kesesi dan rincian pada tiap kategori ATS. Kategori dengan jumlah terbanyak yang berada di wilayah Kecamatan Kesesi adalah kategori Drop Out dan Kategori

Tidak Melanjutkan. Adapaun rincian persebaran ATS di Kecamatan Kesesi adalah sebagai berikut

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Gerakan Kudu Sekolah hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gerakan ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi tingginya jumlah ATS di Kecamatan Kesesi yang apabila dilihat dari fasilitas pendidikan tidak mengalami kendala yang berarti. Bahkan dapat dikatakan bahwa fasilitas pendidikan di Kecamatan Kesesi cukup memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antar *stakeholder* dalam bingkai Gerakan Kudu Sekolah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

2.3 Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan

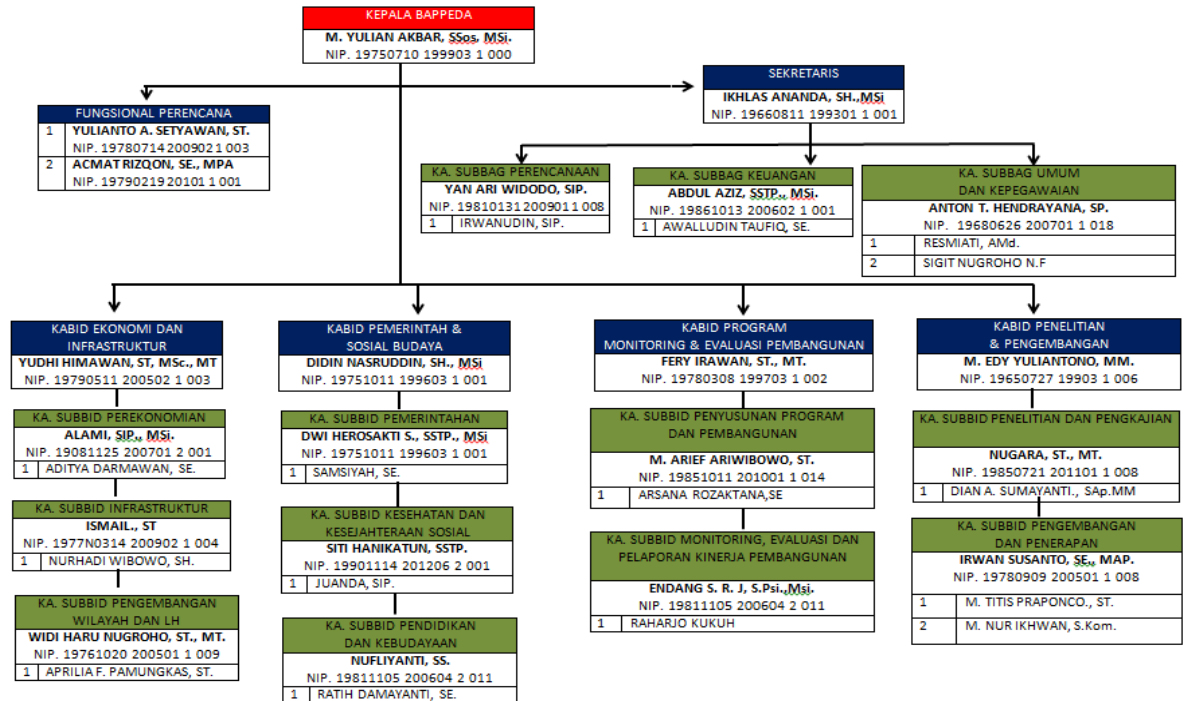
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kabupaten Pekalongan adalah suatu lembaga teknis daerah yang memiliki wewenang di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Bappeda Litbang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Pekalongan mempunyai beberapa tugas pokok salah satunya yaitu membantu Bupati dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.

Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten yang tidak memiliki visi misi tersendiri namun menyesuaikan dengan visi misi kepala daerah. Visi Bupati Pekalongan

tahun 2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong”. Kemudian Misi Bupati Pekalongan tersebut yaitu :

- Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Nasionalis Religius
- Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif
- Menyediakan infrastruktur publik yang merata
- Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau
- Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing
- Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat
- Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran
- Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat
- Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta menyediakan peluang pasar yang luas
- Memperkokoh kerukunan hidup beragama, bergotong royong dan berbudi pekerti
- Mengembangkan potensi kepemudaan, seni budaya dan olahraga

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Bappeda Litbang



Sumber : Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, 2020

Gambar 2.3 menunjukkan Struktur Organisasi Bappeda Litbang. Terdapat beberapa bidang dalam susunan struktur organisasi Bappeda Litbang. Setiap bidang dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang akan dibantu oleh beberapa Kepala Sub Bidang. Adapun secara lebih rinci susunannya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang sekretaris. Dalam menjalankan tugasnya sekretaris dibantu oleh 3 kepala sub bagian, yaitu :

- Kepala Sub Bagian Perencanaan
- Kepala Sub Bagian Keuangan

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
 - Sub Bidang Perekonomian
 - Sub Bidang Infrastruktur
 - Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup
- 4. Bidang Pemerintah dan Sosial Budaya
 - Sub Bidang Pemerintahan
 - Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
 - Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- 5. Bidang Program, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan
 - Sub Bidang Penyusunan Program Pembangunan
 - Sub Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja
Pembangunan Daerah
- 6. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian
 - Sub Bidang Pengembangan dan Penerapan

2.4 Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan

Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pekalongan yang memiliki wewenang di bidang pendidikan dan Kebudayaan. Secara lebih jelas, dalam profilnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pendidikan dan kebudayaan mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, sarana dan prasarana pendidikan, dan kebudayaan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan memiliki Visi “Terwujudnya Pendidikan yang Bermutu, Berkeadilan, Berkarakter, dan Berbudaya”. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa misi, yaitu :

1. Meningkatkan Layanan Pendidikan yang Merata dan Bermutu
2. Mewujudkan Pendidikan yang berkarakter dan Berbudaya
3. Meningkatkan Mutu Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan

Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Dinas Penddikan



Sumber : dindikbud.pekalongakab.go.id

Gambar 2.4 menunjukkan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Struktur ini dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 45) adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - Subbagian Program
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Subbagian Keuangan

3. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - Seksi Sekolah Dasar
 - Seksi Sekolah Menengah Pertama
 - Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar
4. Bidang PAUDNI
 - Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 - Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal
 - Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK
5. Bidang Sarana dan Prasarana
 - Seksi Sarana dan Prasarana TK
 - Seksi Sarana dan Prasarana SD
 - Seksi Sarana dan Prasarana SMP
6. Bidang Kebudayaan
 - Seksi Sejarah Nilai Tradisional dan Kepurbakalaan
 - Seksi Seni Budaya
7. UPT Pendidikan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

2.5 Gerakan KUDU Sekolah

Gerakan Kudu Sekolah merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan. Gerakan ini berupaya untuk merangkul berbagai elemen masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama – sama saling bersinergi menurunkan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pekalongan. Gerakan ini dimulai sejak bulan Desember 2018 namun secara resmi

dilakukan *launching* pada tanggal 2 Mei 2019. Bappeda Litbang dalam hal ini Bidang Pemerintah, Sosial, dan Budaya lebih spesifik di Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Dinas Pendidikan menjadi salah satu aktor yang berperan penting dalam gerakan Kudu Sekolah ini. Keduanya menjadi *leader project* yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan upaya pengembalian anak tidak sekolah melalui gerakan Kudu Sekolah.

Gerakan Kudu Sekolah memiliki tujuan filosofis bahwa seluruh anak di Kabupaten Pekalongan yang masuk dalam usia sekolah harus sekolah. Kata ‘Kudu’ sendiri dalam bahasa Jawa berarti harus. Gerakan KUDU sekolah yang berbasis kolaboratif merangkul seluruh *stakeholder* yang berpengaruh di Kabupaten Pekalongan terutama dalam bidang pendidikan. Kolaborasi Pentahelix menjadi konsep utama yang diusung dalam gerakan ini, sebagaimana disebutkan dalam buku profil Kudu Sekolah (Litbang, 2020). Oleh karena itu, dibentuklah tim Kudu sekolah mulai dari tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa. Dalam susunan tim Kudu sekolah tersebut terdiri dari pemerintah mulai dari tingkat kabupaten hingga desa terdapat juga unsur – unsur masyarakat lain sehingga diharapkan dapat tercipta kolaborasi *pentahelix* yang komprehensif. Tim Kudu Sekolah pada setiap tingkat pemerintahan memiliki tugas dan wewenang masing – masing, pembagian tugas ini bertujuan agar terciptanya efektivitas dan tercapainya tujuan dari gerakan Kudu Sekolah ini.

2.5.1 Tim Kudu Sekolah Tingkat Kabupaten

Adapun Tim Kudu Sekolah tingkat Kabupaten dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 420.1/193 Tahun 2020 yang diketuai oleh

Tim PKK Kabupaten Pekalongan. Secara umum, tim Kudu Sekolah di tingkat Kabupaten memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan memimpin setiap aksi yang berkaitan dengan penurunan angka ATS. Adapun tugas secara rinci dari Tim Kudu Sekolah tingkat kabupaten yaitu :

- a. Memberikan dukungan kebijakan yang dibutuhkan oleh bupati dalam penyelenggaraan program wajib belajar di Kab. Pekalongan.
- b. Melakukan koordinasi Tim Gerakan KUDU Sekolah di Tingkat Kecamatan
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program/kegiatan Gerakan KUDU Sekolah.

2.5.2 Tim Kudu Sekolah Tingkat Kecamatan

Tim Kudu sekolah di tingkat Kecamatan diketuai oleh Sekretaris Kecamatan. Tim Kudu Sekolah tingkat kecamatan dapat dikatakan sebagai jembatan antara tim Kudu Sekolah tingkat kabupaten dan tingkat desa. Secara umum terdapat 4 tugas pokok yang menjadi wewenang tim Kudu Sekolah tingkat kecamatan mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, hingga dukungan kemitraan dan pembiayaan. Secara rinci, tugas dan wewenang Tim Kudu Sekolah tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan Pendataan ATS
 - 1) Membuat rencana program/kegiatan/aksi tim.
 - 2) Melakukan koordinasi Tim Gerakan KUDU Sekolah di Tingkat Desa dalam proses pengumpulan, verifikasi, dan validasi data ATS.

- 3) Mengecek kelengkapan dan menyesuaikan data dengan format pendataan Gerakan KUDU Sekolah.
 - 4) Melakukan koordinasi Tim Gerakan KUDU Sekolah Tingkat Desa dalam proses pengisian laporan.
 - 5) Menyampaikan data ATS yang telah diverifikasi dan validasi dari desa ke kabupaten.
- b. Jangkauan ATS
- 1) Melakukan koordinasi Tim Gerakan KUDU Sekolah Tingkat Desa dalam proses jangkauan ATS ke rumah-rumah.
 - 2) Menerima data dari desa yang berkaitan dengan ATS yang bersedia atau tidak bersedia dikembalikan ke sekolah
 - 3) Melakukan komunikasi dan mediasi antara siswa yang akan dikembalikan ke sekolah dengan satuan pendidikan yang dipilih oleh siswa tersebut.
 - 4) Memberikan penjelasan kepada satuan pendidikan, terkait pengembalian ATS.
 - 5) Melakukan koordinasi proses pengembalian ATS, mulai dari tahap pendaftaran hingga masuk sekolah kembali
- c. Monitoring dan Evaluasi ATS
- 1) Melakukan kegiatan monev terhadap satuan pendidikan formal dan non formal penerima ATS.
 - 2) Menyusun laporan perkembangan anak yang dikembalikan ke sekolah sebagai *output* dari proses monev.

- 3) Memastikan dukungan satuan pendidikan baik formal maupun non formal untuk turut serta aktif dalam memonitoring ATS yang sudah kembali ke sekolah di satuan pendidikannya.
- 4) Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa bersama dengan Tim Pengawas Sekolah/Korwil Dinas Dikbud dalam mengatasi anak yang sudah bersekolah, tetapi keluar lagi dari sekolah berdasarkan data monitoring melalui aplikasi KUDU Sekolah.

d. Kemitraan dan Pembiayaan ATS

- 1) Memberi pelatihan dan pembekalan kepada Tim Gerakan KUDU Sekolah Tingkat Desa.
- 2) Melakukan koordinasi pengelolaan, pengembangan, dan penguatan kemitraan serta kepedulian seluruh elemen masyarakat di wilayah kerjanya.
- 3) Mencari alternatif pembiayaan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Gerakan KUDU Sekolah di wilayah kerjanya.
- 4) Memberikan pembekalan dan pemahaman kepada Tim Gerakan KUDU Sekolah Tingkat Desa tentang seluruh proses pengembalian ATS

2.5.3 Tim Kudu Sekolah Tingkat Desa

Tim Kudu Sekolah tingkat Desa menjadi salah satu ujung tombak dari gerakan Kudu Sekolah, hal ini dikarenakan pemerintah desa yang merupakan salah satu aktor yang berada dalam tim ini memiliki kemampuan untuk menjangkau secara langsung sasaran yang dimaksud yaitu ATS. Tim Kudu

Sekolah di tingkat desa diketuai oleh Sekretaris Desa. Tugas dan Kewenangan Tim Kudu Sekolah di Tingkat Desa adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan dan Pendataan ATS

- 1) Membuat rencana program/kegiatan/aksi tim.
- 2) Melakukan proses pengumpulan, verifikasi, dan validasi data ATS.
- 3) Melaksanakan pengisian data sesuai dengan format pendataan Gerakan KUDU Sekolah.
- 4) Membuat laporan hasil.
- 5) Menyampaikan data ATS yang sudah divalidasi kepada Tim KUDU Sekolah Tingkat Kecamatan.
- 6) Melakukan input data ke dalam sistem aplikasi KUDU Sekolah.

b. Jangkauan ATS

- 1) Melaksanakan proses penjangkauan ATS ke rumah-rumah.
- 2) Melakukan komunikasi dan mediasi kepada siswa dan keluarga ATS agar bersedia kembali bersekolah.
- 3) Menyampaikan data ATS yang bersedia atau pun tidak bersedia dikembalikan ke sekolah kepada Tim Gerakan KUDU Sekolah Tingkat Kecamatan.
- 4) Membuat laporan hasil pendampingan sesuai dengan format pelaporan.
- 5) Melakukan koordinasi bersama Tim Gerakan KUDU Sekolah Tingkat Kecamatan terkait proses pengembalian ATS, mulai dari proses pendaftaran hingga kembali bersekolah dan bersedia kembali bersekolah.

Tim Kudu Sekolah yang terbentuk dari tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa ini saling melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dalam memastikan terjadinya penurunan ATS dalam setiap periode gerakan tersebut.